

H A R I A N

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SENIN / 07 Desember 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN-JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Mau kerja kantor atau kerja lapangan sama saja, sarjana atau tidak bukan jadi ukuran, karena harga diri seorang laki-laki bekerja dan bukan banyak cerita, apalagi main wanita

Ricky Harun, Aktor

SIASAT JAHAT JULIARI

SARANG KORUPSI, KEMENSOS PERNAH DIBUBARKAN GUS DUR



Era reformasi, Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membubarkan Departemen Sosial (Depsos). Alasannya, karena telah menjadi 'sarang' korupsi. "Persisnya itu karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedeane sampai hari ini. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung," ujar Gus Dur pada Desember 2009 lalu. Dan ujaran itu makin terbukti nyata setelah ditetapkannya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. Siasat jahat Juliari dengan tega 'meminta' jatah di setiap paket sembako yang dibagikan bagi warga terdampak pandemi sungguh ironis. Dia memotong Rp 10 ribu/paket sembako dari nilai Rp 300 ribu/paket bantuan sosial. Terkumpul fee senilai Rp 12 miliar di bansos tahap 1 dan Rp 8,8 miliar pada bansos ke-2. Dan untuk diketahui, dana penanganan corona di negeri ini bersumber dari utang. Juliari menjadi menteri kedua yang ditangkap KPK dalam jangka waktu 10 hari saja, pasca Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo tersandung benur.

Baca Hal 11

STRATEGI KORUPSI DANA BANSOS JULIARI

Diawali pengadaan barang berupa bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai kurang lebih Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.

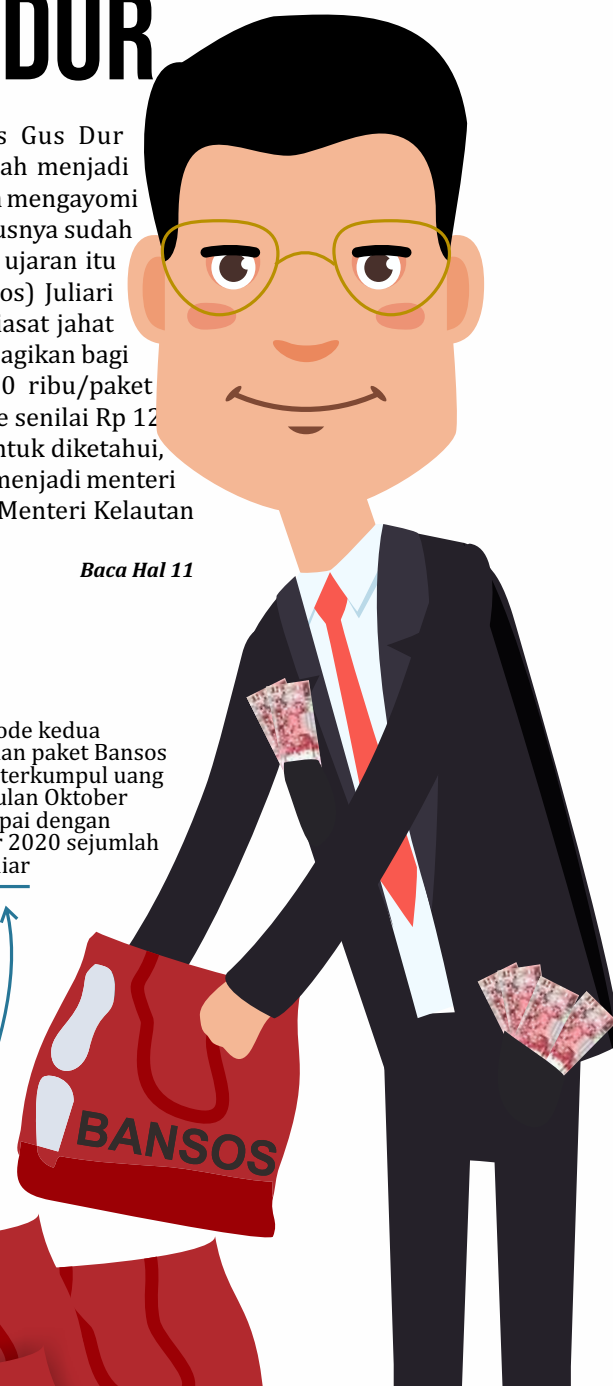
Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen

Ditunjuk supplier yang salah satunya PT RPI diduga milik Matheus Joko Santoso

Pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar

Ada kesepakatan fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp 12 miliar, diberikan secara tunai dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari. Ada uang sekitar Rp 8,8 miliar yang diduga dipakai untuk keperluan Mensos Juliari.



CATAT! PROYEK STRATEGIS NASIONAL SENILAI RP 464 T DIKEBUT DI 2021

Jakarta – Meski tahun 2021 dunia masih dibayangi Pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia optimistis bisa menyelesaikan berbagai proyek strategis. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut sebanyak 38 proyek strategis nasional (PSN) akan disebut tahun depan. Nilai 38 PSN ini sebesar Rp 464,6 triliun. Adapun total seluruh PSN ada sebanyak 201 proyek dan 10 program dengan total investasi Rp 4.809,7 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan 201 PSN dan 10 program dengan mencakup 23 sektor ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020. "Pada 2021, kita akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu (6/12).

Mulanya daftar PSN ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Sejak 2016 sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp 588,9 triliun telah diselesaikan.

Pada awal 2020, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kemenko Perekonomian dimandatkan melakukan evaluasi atas usulan PSN, dan telah melakukan evaluasi terhadap 269 usulan proyek dan program dari Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Swasta. Evaluasi tersebut mempertimbangkan Daftar PSN sebelumnya, serta usulan-usulan baru menggunakan berbagai kriteria.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

"Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua Usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional," ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, kriteria dasar yang dimaksud antara lain kesesuaian dengan RPJMN, rencana strategis, rencana tata ruang, atau diatur dalam peraturan khusus, juga mempertimbangkan kriteria strategis, seperti memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antar sektor, dan pertimbangan distribusi proyek secara regional.

Selain itu, pertimbangan kriteria operasional, antara lain memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp 500 miliar, dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 dengan pengecualian proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024, serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.

Dengan evaluasi berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 Sektor, dengan

total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun, telah ditetapkan sebagai Daftar PSN terbaru dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta.

"Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," katanya.

Program-program strategis nasional tersebut memperluas ruang lingkup dari PSN sebelumnya yang hanya mencakup 3 program, menjadi 10 program yang keseluruhannya mencakup Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Program Pemerataan Ekonomi, Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Program Pembangunan Smelter, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), Program Pengembangan Superhub, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah. (ist)

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Meliputi 15 Sektor pada Tingkat Proyek dan 2 Sektor pada Tingkat Program

SUMATERA

61 Proyek
Rp. 638 Triliun

KALIMANTAN

24 Proyek
Rp. 564 Triliun

JAWA

93 Proyek
Rp. 1.065 Triliun

BALI & NUSA TENGGARA

93 Proyek
Rp. 1.065 Triliun

SULAWESI

27 Proyek
Rp. 155 Triliun

MALUKU & PAPUA

13 Proyek
Rp. 444 Triliun

TERSEBAR NASIONAL

12 Proyek Rp. 264 Triliun
2 Program Rp. 1.056 Triliun

DPR BERHARAP 'RUU EBT' MAMPU JAWAB KEINGINAN INVESTOR

Jakarta – Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan jawaban di tengah cadangan energi fosil yang semakin berkurang. Kementerian ESDM mencatat, saat ini kondisi energi nasional 90% berasal dari fosil. Sebenarnya, pemerintah sudah menetapkan peranan EBT dalam bauran energi nasional harus mencapai 23% pada tahun 2025. Namun realisasinya masih sangat minim.

Melihat itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang akan dikebut tahun depan bisa menjawab investor yang menginginkan kepastian hukum terkait sektor tersebut.

"RUU EBT yang saat ini masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 harus mampu menjawab kebutuhan investor agar mereka nyaman berinvestasi di sektor energi terbarukan," katanya dalam siaran pers dikutip, Minggu (6/12).

Menurut dia, akan banyak terdapat pilihan skema pendanaan pengembangan EBT jika aturan main, baik UU maupun produk hukum turunannya, mampu memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang dibutuhkan investor. Ia juga menyatakan bahwa harus ada ke-berpihakan yang jelas melalui berbagai kebijakan pemerintah jika ingin target pengembangan EBT lebih cepat terealisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada 2025, peran EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan mencapai 23 persen dan diharapkan terus meningkat menjadi 31 persen pada 2050.

Amin berpendapat bahwa jangka waktu 30 tahun atau hingga 2050 bukanlah waktu yang terbilang sebentar guna merealisasikan target tersebut. Ia mengungkapkan Uni Eropa saat ini memiliki dana sebesar 350 juta euro untuk pengembangan EBT di Indonesia, namun mereka membutuhkan komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pengembangan EBT.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana perdagangan karbon yang dimiliki lembaga donor internasional maupun perusahaan nasional dan multinasional.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang meratifikasi Paris Agreement, yang pada 2030, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen, jika dilakukan dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan Internasional.

Untuk itu, Amin Ak mendorong percepatan lahirnya undang-undang yang mem-

berikan kepastian hukum bagi pihak swasta ataupun lembaga internasional yang ingin berinvestasi di sektor energi baru dan terbarukan di Tanah Air.

Terpisah Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan saat ini pihaknya terus mengebut penyelesaian RUU EBT tersebut. "Pertengahan masa sidang sudah selesai draf terakhir [RUU EBT], setelah itu UU EBT segera diparipurnakan dan masuk UU Migas kurang lebih Juli 2021 akan membahas UU Migas," katanya dalam sebuah webinar yang digelar pada Sabtu (5/12).

Sugeng menjelaskan bahwa UU Migas sempat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2018 dan sudah dibawa ke dalam sidang paripurna. Namun, pemerintah melalui surat presiden (surpres) belum menyertakan daftar inventaris masalah (DIM).

Pada 2019, memasuki masa jabatan anggota DPR yang baru dengan Prolegnas baru yakni UU Minerba, UU EBT, dan terakhir adalah UU Migas. Pasalnya, Sugeng mengatakan bahwa dalam perspektif ketahanan energi nasional, EBT lebih memerlukan perhatian.

"Betul UU Migas sangat penting, tetapi hari ini kita melihat kepentingan yang lebih besar dalam konteks energi. Jadi, semuanya menjadi penting," ungkapnya. (ist)

KUNCI ENERGI TERBARUKAN DAN LISTRIK TENAGA SURYA DI INDONESIA

1

2019 Update

Selama tahun 2019 Indonesia telah menambah 385 MW energi terbarukan sehingga total sudah ada 10.169 MW penggunaan energi terbarukan dengan peningkatan 3% pertahunnya

2

6 Tahun Terakhir

Selama 6 tahun terakhir, kapasitas energi terbarukan meningkat 2,09 GW atau 348 MW per tahunnya

3

Solar Energi

Energi surya merupakan sumber energi terbarukan terbesar di Indonesia hingga november 2019 baru dimanfaatkan sebesar 152 MW atau 0,028% dari 536 GW potensinya dari 152 MW ini, sekitar 11% atau 16,6 MW berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap

4

PLTS Atap

Penggunaan PLTS atap meningkatkan hingga 4 kali lipat dari 351 di 2017 menjadi 1435 penggunaan di tahun 2019, menyumbang sekitar 16,66 MW dari total kapasitas PV di tahun 2019. Lebih dari 90% pengguna berasal dari sektor perumahan (Sekitar 2-4 MW dari total kapasitas yang terinstal), sektor ini merupakan pasar utama PLTS atap selama 2 tahun terakhir

5

Peluang

Kajian dari IESR menunjukkan jika potensi pasar PLTS atap dengan penggunaan listrik 1,300 VA di Indonesia berkisar dari 34,5 - 116,3 GW. Untuk posisi terendah saja, penggunaannya dapat menghasilkan 48,6 TWh atau 20% dari total kebutuhan energi di Indonesia pada tahun 2019 (245 TWh)

6

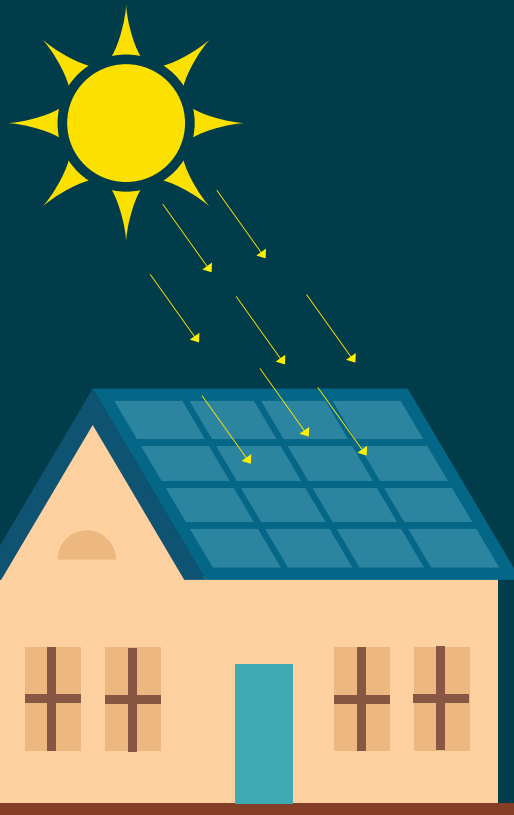
Instalasi Solar

Hingga november 2019, 152 MW PV telah diinstal, meskipun di tahun 2019 mencatat pertumbuhan energi surya terbesar dengan 44% peningkatan per tahunnya. Jumlah ini masih jauh dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan instalasi 550 MW di akhir tahun 2019

7

Mengatasi Kekurangan

Indonesia butuh 1000 MW instalasi PV per tahun sejak tahun 2020 hingga 2025 untuk mencapai target 6500 MW di RUEN. Untuk mencapai target ini pemerintah harus mendukung penggunaan solar PV terdistribusi. (PLTS atap atau Off Grid)



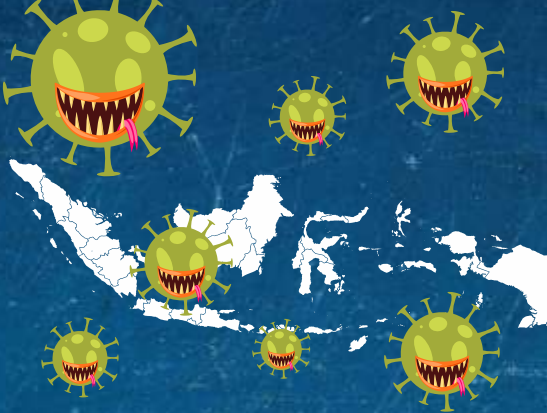
CORONA STABIL TINGGI, 6 VAKSIN DIPUTUSKAN DIPAKAI RI

Jakarta- Penambahan kasus positif virus Covid-19 pada Minggu (6/12) masih stabil diangka tinggi yaitu bertambah 6.089 kasus. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun sudah menetapkan 6 vaksin corona yang bisa dipakai di Indonesia.

Keenam vaksin tersebut harus memenuhi syarat wajib, yakni masih dalam tahap uji klinis tahap III atau yang telah selesai menjalani uji klinis tahap III. Itu artinya, keenam vaksin tersebut harus mendapatkan izin edar BPOM RI. Paling tidak, mendapat izin penggunaan di masa darurat atau emergency use authorization (EUA).

Saat ini, Indonesia masih menguji klinis tahap III vaksin Sinovac asal China di Bandung, Jawa Barat. BPOM RI berharap data interim uji klinis fase III Sinovac dapat diserahkan awal Januari 2021. Meski demikian, dalam Kepmen yang diteken, Terawan dapat mengubah jenis vaksin yang terdaftar berdasarkan arahan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Keputusan penggunaan enam vaksin tersebut mulai berlaku pada sejak 3 Desember 2020.

Untuk diketahui, total positif jadi 575.796, sembuh 474.771, dan meninggal 17.740. Penambahan kasus terbanyak pertama terjadi di Jawa Barat, yakni 1.388. Total sampai saat ini menjadi 59.273 orang.



Diikuti di bawahnya ada DKI Jakarta dengan 1.331 penambahan kasus Corona dan Jawa Timur dengan 572 penambahan kasus. Penambahan kasus tersebut dihasilkan dari pemeriksaan spesimen sebanyak 50.634. Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 4.322. Dengan demikian, hingga hari ini ada 474.771 pasien Corona yang sembuh.

Sementara itu, dilaporkan hingga hari ini pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah 151, sehingga total menjadi 17.740 orang. Dilaporkan juga pemerintah pada hari ini memantau kasus suspek Corona sebanyak 70.091. (ist)

6 VAKSIN YANG BISA DIPAKAI DI INDONESIA

1. Vaksin yang diproduksi BUMN Farmasi, Bio Farma

2. AstraZeneca - Vaksin asal Inggris dan Swedia yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan Vaccitech. AstraZeneca sudah tercatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan telah memasuki uji klinis fase III di China hingga Brasil.

3. Sinopharm - Vaksin asal China yang dikembangkan oleh Grup Farmasi Nasional China. Sudah tercatat oleh WHO dan telah memasuki uji klinis fase III di Uni Emirat Arab, Bahrain hingga Argentina

4. Moderna - Vaksin asal perusahaan farmasi yang berbasis di Massachusetts, AS. Sudah tercatat oleh WHO dan diklaim efektif 94%. Telah memasuki uji klinis fase III di Eropa, Inggris, dan AS.

5. Pfizer Inc and BioNTech - Vaksin asal perusahaan yang berbasis di New York, AS. Sudah tercatat oleh WHO dan diklaim efektif 95%. Telah memasuki uji klinis fase III di AS, Jerman, Turki, Afrika Selatan, hingga Argentina.

6. Sinovac - vaksin perusahaan asal China. Sudah tercatat oleh WHO. Sedang menjalani uji klinis fase III di Brasil dan di Bandung, Indonesia. Diperkirakan mendapat izin penggunaan darurat pada pekan ketiga dan keempat Januari 2021.



BAHAYA HIV AIDS MENGANCAM DI TENGAH PANDEMI

SURABAYA - Setiap Desember tepatnya tanggal 1 diperingati sebagai World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia. Di tengah pandemi, penanganan penyakit HIV/AIDS dinilai mengalami hambatan. Mulai dari tak adanya pemeriksaan langsung hingga makin menipisnya stok obat yang wajib diminum oleh penderita.

Yayasan Mahameru, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi Orang Dengan HIV Aids (ODHA) mencatat, pada awal wabah virus corona Maret lalu, para tenaga medis meminimalisir kontak layanan kesehatan terhadap pasien ODHA.

"Sehingga ODHA hanya ambil obat setiap bulan dengan menghubungi pendampingnya. Janji ketemuan di luar layanan, ada beberapa yang mengirim tapi sepengetahuan layanan," ujar Farid Hafifi, Ketua Yayasan Mahameru, Minggu (6/12).

Alur-alur ini kemudian disepakati bersama, terutama saat petugas pelayanan minta pendamping mengirim obat. Hampir di 29 kabupaten/kota di Jatim juga melakukan hal yang sama pada saat awal pandemi.

"Habis lebaran itu mulai menuju setengah normal, ODHA berani datang ke layanan kesehatan. Beberapa tempat juga diperbolehkan, tapi di beberapa tempat setelah diperbolehkan akhirnya kembali dilarang. Sebab kasus pasien yang terpapar corona kembali naik," ungkapnya.

Dengan kontak layanan yang dikurangi,

ODHA mengalami ketakutan. Hampir 10 orang dinyatakan positif covid. Sehingga ada risiko lain yang dihadapi. Apalagi pengobatan lebih rumit karena disamping rutin mengonsumsi obat ARV seumur hidup, mereka juga harus minum obat untuk virus corona.

Obat ARV disediakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk disalurkan ke seluruh wilayah. Sayangnya, stok obat juga menipis tahun ini akibat beberapa negara menerapkan lockdown. Meski sempat kembali normal, jumlah persediaan obat kembali berkurang banyak.

"Obat ARV itu ada 11 jenis dengan 3 kombinasi. Selama persediaan belum datang,

kalau habis bisa dialihkan dengan obat yang lain. Beberapa kami dengar, mulai adaptasi lagi, minimal yang mereka alami mual dan pusingnya muncul. Terkait efek samping yang mereka keluhkan. Tidak semua tapi sebagian muncul itu," terangnya.

Menurut Farid, pihaknya telah menghubungi Dinas Kesehatan dan pemerintah mengatakan sampai awal tahun stok Obat ARV masih aman.

Saat ini, Yayasan mahameru mendampingi ODHA sebanyak 17 ribu orang sejak tahun 2020. Dengan usia produktif diatas 25 sampai 60 tahun. Penyebab terkena HIV/AIDS bermacam macam, mulai seks bebas dan pemakai narkoba. (ard)



PERTAMA DI JATIM, BAWASLU BLITAR MILIKI 4 APLIKASI PENGAWASAN PILBUP 2020

BLITAR – Launching 4 aplikasi penunjang kerja pengawasan pada Pilbup Blitar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menjadi yang pertama di Provinsi Jatim. Inovasi itu terdiri dari, Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT), Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 2020, Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara (Putung) dan Sistem Pengarsipan (SIP) Balitar.

"Saya mewakili Bawaslu Provinsi Jatim memberikan apresiasi, untuk Bawaslu Kabupaten Blitar telah menjadi Bawaslu pertama di Jatim yang mampu melaunching aplikasi, sebagai alat penunjang kerja pengawasan," ujar Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jatim, Nur Elya Anggraini saat Rapat Kerja Teknis bersama Bawaslu Kabupaten Blitar akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Elya menjelaskan aplikasi ini merupakan sebuah bentuk inovasi, serta pemikiran yang maju dari Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Blitar. "Digitalisasi adalah salah

satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu langkah yang diambil Bawaslu ini merupakan strategi tepat untuk meningkatkan kualitas kerja para pengawas dilapangan," jelasnya.

Selain itu, Elya juga menilai keempat aplikasi Bawaslu ini adalah paket komplet, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dia berharap program serupa bisa menjadi contoh untuk Bawaslu di kabupaten atau kota lain penyelenggara Pilkada 2020 di Jawa Timur "Pesan saya kepada teman-teman yang bertugas, terutama di tingkat kecamatan. Harus disiplin dan lebih teliti dalam mendokumentasikan hasil kerjanya," tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin menuturkan pihaknya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas pengawasan, secara profesional dengan didukung aplikasi untuk memudahkan pengawasan. "Termasuk memberikan panduan kepada jajaran pengawas di kecamatan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS). Agar lebih mudah



Bawaslu Kab. Blitar Launching 4 Aplikasi Penunjang Pengawasan Pilbup 2020

dalam melaksanakan tugas. Salah satunya, dengan melaunching aplikasi penunjang kerja pengawasan pencoblosan," tutur Hakam.

Launching aplikasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Teknis, yang diikuti seluruh Panwascam se-Kabupaten Blitar. Diungkapkan Hakam ada 4 aplikasi yang diluncurkan, yakni Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT), Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 2020, Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara (Putung) dan Sistem Pengarsipan (SIP) Balitar. "Tujuannya adalah untuk memudahkan petugas dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, mengingat saat ini jaman kemajuan IT semua serba digital," ungkapnya. (ais)

9 PROVINSI PILKADA RAWAN CORONA: RIAU, SUMBAR HINGGA KALSEL

Jakarta- Dua hari jelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Pawaslu) memperbaharui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, kerawanan terus mengalami peningkatan menjelang hari pencoblosan 9 Desember.

Bawaslu mendapati kerawanan Pilkada 2020 di 270 daerah berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah berada dalam kondisi rawan rendah.

"Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan," kata Komisioner Bawaslu M Afifudin dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Bawaslu menjelaskan dalam isu ada peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Jumlah daerah dengan kerawanan tinggi dalam aspek pandemi terus meningkat dibandingkan Juni dan September lalu.

"Jika pada pemutakhiran IKP Pilkada 2020 September daerah yang termasuk dalam rawan tinggi pada aspek pandemi berjumlah 50 kabupaten/kota, pada IKP November 2020 jumlahnya meningkat 24 persen menjadi 62 kabupaten/kota," ucap Afif.

Berlandaskan IKP tiga hari jelang pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menyebut sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi Covid-19.

"Provinsi dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kepulauan Riau dengan skor 95,4. Kemudian Sumatera Barat 89,7, Jambi 87,4, Bengkulu 86,2, Kalimantan Tengah 79,3, Sulawesi Tengah 78,2, Kalimantan Selatan 73,6, Sulawesi Utara 73,6 dan Kalimantan Utara 67,8," ujar Afif.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, ada 62 daerah memiliki kerawanan tinggi dalam aspek pandemi Covid-19 dan 199 kabupaten/kota termasuk dalam kategori rawan sedang.

"Urutan 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada aspek pandemi adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan skor 100, kemudian Kabupaten Agam 89,7, Kabupaten Natuna 88,5, Kabupaten Purworejo 79,3, Kabupaten Kotawaringin Timur 79,3, Kabupaten Morowali Utara 78,2, Kota Semarang 77, Kabupaten Tuban 77, Kabupaten Tasikmalaya 75,9 dan Kabupaten Purbalingga 74,7," tutur Afif.

Bawaslu menggunakan 11 indikator dalam mengukur kerawanan Pilkada 2020

dalam aspek pandemi Covid-19. 11 indikator itu terbagi menjadi tiga kelompok yang diukur yakni penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.

"11 indikator itu adalah ada atau tidaknya penyelenggara Pemilu yang positif terinfeksi COVID-19, meninggal karena terinfeksi Covid-19 dan mengundurkan diri karena alasan COVID-19 serta penyelenggara pemilu yang tidak disiplin protokol kesehatan," kata Afif.

Sedangkan dari sisi peserta pemilu, indikator yang diukur adalah ada atau tidaknya pasangan calon atau tim kampanye yang positif terinfeksi Covid-19 dan tidak menerapkan protokol kesehatan serta kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa.

Kemudian dari kondisi daerah, indikator yang diukur adalah perubahan status wilayah menyangkut pandemi Covid-19, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia dan pasien Covid-19 yang tidak tertangani. (ist)

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TERTINGGI

- Kepulauan Riau (95,4)
- Sumatera Barat (89,7)
- Jambi (87,4)
- Kepulauan Riau (95,4)
- Sumatera Barat (89,7)
- Jambi (87,4)
- Kepulauan Riau (95,4)
- Sumatera Barat (89,7)
- Jambi (87,4)

TOP 10 KAB/KOTA MEMILIKI KERAWANAN TINGGI

- Teluk Wondama (1000)
- Kabupaten Agam (89,7)
- Kabupaten Natuna (88,5)
- Kabupaten Purworejo (79,3)
- Kabupaten Kotawaringin Timur (79,3)
- Kabupaten Morowali Utara (78,2)
- Kota Semarang (77)
- Kabupaten Tuban (77)
- Kabupaten Tasikmalaya (75,9)
- Kabupaten Purbalingga (74,7)





Rahmania Astrini

**PENYANYI YANG TERKENAL
LEWAT MEDIA SOSIAL**

Penyanyi Rahmania Astrini (Astri) mengungkapkan perasaannya bekerja sama dengan penulis lirik ternama kelahiran Jerman, Toby Gad melalui single "Shush".

"Dia (Toby) adalah sosok legendaris. Dia yang menciptakan lagu favorit saya sepanjang masa, 'If I Were a Boy'. Awalnya agak susah buat mengikuti frekuensi dia, but in the end, setelah dengar hasilnya, saya mengerti kenapa dia seperfeksionis itu," dalam siaran persnya (Rabu, 2/12/2020).

Menurut pelantun "Runaway" dan "Finally Found You" itu, bekerja sama dengan Toby adalah momen yang menantang, seru, dan membanggakan. Selama proses rekaman, Astri mengaku banyak belajar dari kolaborasinya ini.

"It was really challenging, and I learnt a lot from it. Tapi seru juga, untuk berkolaborasi dengan Toby Gad," ujar dia yang mengaku merasakan banyak note yang sulit dikejar.

Lagu "Shush" berkisah tentang membalas kebaikan untuk seseorang yang penting. Astri menggambarkan ada peran seperti mengambil alih peran, serta melayani orang yang kita cintai.

Video musik lagu ini yang dibuat dengan konsep estetika tahun 1990-an tayang satu

juta kali di Youtube hanya dalam waktu dua hari sejak dirilis.

Mengenai sosok Toby Gad sendiri, dia sudah dikenal di kancah musik dunia, sebagai pencipta lagu-lagu hit seperti "If I Were a Boy" (Beyonce), "Big Girls Don't Cry (Fergie)" dan "All of Me" (John Legend).

Dia pernah memenangkan tiga Grammy dan masuk lima nominasi Grammy, salah satunya melalui "All of Me" yang dia ciptakan bersama John Legend.

Melalui lagu itu dia meraih Grammy Award ke-57 tahun 2015 untuk kategori Best Remixed Recording, Non-Classical. Sementara, lagu versi live-nya dinominasikan dalam kategori Best Pop Solo Performance pada Grammy Awards tahun yang sama.

Toby juga terlibat dalam pembuatan album penyanyi Kelly Clarkson berjudul "Stronger", yang masuk dalam empat nominasi pada Grammy Awards ke-55 dan memenangkan kategori Best Pop Vocal Album.

Rahmania Astrini lahir di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat pada 4 Juli 2001.

Rahmania Astri adalah seorang penyanyi muda juga penulis lagu asal Indonesia yang namanya terkenal lewat sosial media.

Penyanyi muda ini kerap membagikan video bernyanyinya di media sosial Instagram dan YouTube miliknya.

Berawal dari hobi dan keisengan meng-cover lagu dan mempostingnya di media sosial, gadis asal Bandung ini mendapatkan sambutan hangat dari netizen.

Rahmania memulai kerierinya sejak tahun 2017, meskipun baru beberapa tahun di industri musik Indonesia, namun Rahma telah memiliki prestasi sebagai Penyanyi R&B Solo Terbaik pada AMI Awards 2019.

Kini penikmat musiknya di kanal YouTube telah mencapai angka 3.6 juta kali ditonton dengan total 91 ribu pelanggan (subscribers).

Setelah merilis single berjudul Menua Bersama dan me-recycle lagu lama berjudul Aku Cinta Dia, Rahmania Astrini kembali menunjukkan identitas musiknya lewat lagu hasil karyanya sendiri dengan genre alternative soul/R&B berjudul It's Amazing.

Lagu ini menceritakan tentang generasi saat ini yang ingin mencapai kesuksesan dengan cara yang instan tanpa melalui banyak proses.

Namun, mereka melewatkan banyak pelajaran berharga yang bisa membuat mereka berada di puncak kesuksesan untuk jangka waktu yang lama (Ant).





PENYEBAB GEJALA UMUM RISIKO COVID JANGKA PANJANG

Virus corona baru yang memicu kekhawatiran masyarakat luas belakangan ini adalah Covid-19 jangka panjang atau yang dikenal dengan istilah long covid.

Long covid digambarkan sebagai gejala Covid-19 yang dialami selama berbulan-bulan. Ini berbeda dengan efek gejala yang lebih ringan, yang tampak bersifat sementara tetapi lebih intensif, seperti demam atau suhu tinggi.

Sebaliknya, gejala long covid tergolong berbahaya karena dapat merusak kualitas hidup tanpa membuat orang mampu melakukan tugas sehari-hari. Menurut British Heart Foundation (BHF) bagi sebagian orang, gejala ini tampak seperti siklus perbaikan tetapi kemudian menjadi lebih buruk.

Dilansir dari Express UK (Rabu (2/12/2020) BHF menyatakan efek jangka panjang ini tidak hanya di antara mereka yang harus dirawat di rumah sakit atau bahkan yang merasa sangat tidak enak badan saat pertama kali tertular virus.

Gejala ini bisa dialami oleh orang yang dianggap telah pulih. Beberapa gejala yang virus corona baru yang termasuk dalam long covid meliputi kelelahan, sesak napas, kecemasan dan depresi, palpitasi, sakit dada, nyeri sendi atau otot, tidak bisa berpikir jernih atau fokus (kabut otak).

Bagaimana long covid terjadi?

Analisis dari ribuan pengguna aplikasi Covid Symptom Study dari ZOE menunjukkan bahwa 1 dari 20 orang pasien kemungkinan besar menderita gejala Covid-19 yang berlangsung lama, sekitar lebih dari delapan minggu.

Analisis juga menemukan bahwa dimungkinkan untuk memprediksi siapa yang cenderung mengembangkan long covid berdasarkan tanda awal penyakit. Semakin banyak gejala berbeda yang dialami pasien dalam minggu pertama, semakin besar kemungkinan mereka mengalami long covid.

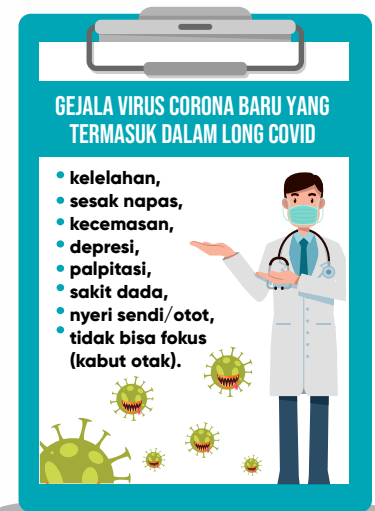
Menggunakan indikasi ini bersama dengan usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh berarti para peneliti dapat secara akurat memprediksi siapa yang paling berisiko mengembangkan gejala jangka panjang.

Secara keseluruhan, tim menemukan bahwa kebanyakan orang dengan Covid-19 dilaporkan kembali normal dalam 11 hari atau kurang. Sekitar 1 dari 7 (13,3 persen atau 558 pengguna) memiliki gejala yang berlangsung selama 4 minggu.

Hasil lain, 1 dari 20 (4,5 persen atau 189 pengguna) tetap sakit selama 8 minggu dan 1 dari 50 (2,3 persen atau 95 pengguna)

menderita gejala dari Covid-19 untuk waktu yang lebih lama, sekitar 12 minggu atau 3 bulan.

Para peneliti juga menemukan bahwa orang tua jauh lebih mungkin terkena long covid daripada orang yang lebih muda. Dilaporkan long covid memengaruhi sekitar 10 persen orang berusia 18-49 tahun dan angkanya meningkat menjadi sekitar 22 persen pada usia di atas 70 tahunan (Ist).





OPPO RENO5 SEGERA MASUK PASAR INDONESIA

Setelah menghadirkan Reno4 pada 6 Agustus 2020, Oppo tengah mempersiapkan penerus perangkat tersebut, Oppo Reno5.

"Kami memang sedang mempersiapkan suksesor dari perangkat Reno4 di Indonesia. Mudah - mudahan jika tidak ada halangan dapat segera diperkenalkan dalam waktu dekat, kemungkinan pada awal tahun mendatang," kata pihak Oppo Indonesia, dalam keterangan tertulis (Rabu, 2/12/2020).

Sementara itu, kepastian kehadiran Oppo Reno5 dapat dilihat melalui dua dokumen berupa sertifikasi postal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pada situs sertifikasi postal terdapat sertifikat perangkat dengan kode CPH 2159 yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat 71283/SDPPI/2020. Sedangkan kode perangkat yang sama tercatat pula

pada situs TKDN kemenperin dengan mendapat nilai TKDN sebesar 31,85 persen.

Meski begitu, Oppo Indonesia belum mengungkap spesifikasi dari perangkat tersebut.

Belakangan banyak beredar kabar mengenai spesifikasi Reno5, mulai dari prosesor, kapasitas RAM atau internal dan konfigurasi kamera.

Hal tersebut belum dapat dikonfirmasi, namun satu yang pasti, perangkat Reno5 nantinya dilengkapi dengan sistem operasi terbaru ColorOS 11 yang berbasis Android 11.

Menariknya, pada sistem operasi ini, Oppo menjanjikan akan membawa berbagai fitur baru dan kustomisasi baru pada perangkat Reno5.

Jika dilihat dari pola kehadiran perangkat Reno sebelumnya, diperkirakan setelah memperkenalkan fitur kamera AI pada

Reno4, nantinya perangkat Reno5 akan berfokus pada fitur perekaman video berbasis kecerdasan buatan.

Sebagaimana diketahui Oppo Reno4 masih terbelang baru. Bahkan, awal November 2020 lalu Oppo meluncurkan Reno4 edisi pesepakbola Mohamed Salah untuk pasar yang disesuaikan dengan asal penyerang Liverpool FC itu, yakni Timur Tengah dan Afrika.

Reno4 Mo Salah Edition ini persis sama dengan "jeroan" Reno4 biasa yang tersedia secara global, yaitu ditenagai Snapdragon 720G dengan mendukung teknologi pengisian daya cepat VOOC 4.0 Flash Charge 30W.

Perangkat tersebut juga mengusung layar OLED 6,4 inci, namun bedanya, terletak pada cover belakang ponsel yang dicat dengan warna abu-abu tua dan merah dengan beberapa aksesoris desain yang menarik -- mozaik foto Mo Salah -- termasuk tanda tangan pesepakbola tersebut (Ant)

Foto : Tamara Bellis/Unsplash



Padu Padan Tote Bag, Kasual Hingga Formal

Tote bag menjadi salah satu jenis tas yang banyak digemari karena tak hanya stylish tapi juga bisa memuat banyak barang. Tak heran jika tas ini menjadi pilihan tepat untuk banyak wanita. Beragam trik bisa kamu lakukan agar tampilan lebih keren dipadu dengan tas tote bag favorit. Sontek beberapa gaya berikut untuk inspirasi tote bag kamu.

Kasual

Untuk penampilan yang sedikit santai, padukan tote bag anyaman dengan atasan motif stripe dan jeans capri. Jika ingin sedikit lebih formal, padukan atas peplum dan skinny jeans serta peep-toe heels dengan tote bag kulit. Kamu juga bisa memadukan tote bag kanvas dengan atasan tunik V-neck serta kacamata hitam.



Formal

Padukan tote bag hitam kamu dengan blazer atau outer panjang yang dipadukan dengan skinny jeans hitam. Jika tidak, padukan dengan setelan serba hitam yang elegan. Untuk kesan yang lebih tomboy, kamu bisa padukan tote bag dengan kemeja oversized dan jeans.

Kalau masih mencari tote bag atau tas keren lainnya, kamu bisa mencari dari koleksi Pamole, tas produksi lokal yang hadir sejak 2019. Brand lokal ini memiliki konsep tas yang simpel, casual, namun juga fungsional. Desain yang dibuat melalui perencanaan yang matang, agar produk yang dihasilkan bisa memuaskan dan memenuhi keinginan pasar. Material yang digunakan

pun berdasarkan pemilihan bahan yang terbaik, menggunakan berbagai jenis bahan seperti kanvas, suede, jeans, corduroy, kulit, serta semua menggunakan bahan berkualitas premium.

“Produk kami dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga Pamole bisa terus berinovasi agar brand ini menjadi trendsetter tas casual yang cocok untuk berbagai aktivitas dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga akan merambah pada produk lain misalnya seperti alas kaki, pakaian, dan produk fashion lainnya,” tutur Fandi Ihsan selaku founder Pamole dalam keterangan tertulisnya.

Harga tas dibanderol dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp30 ribu-Rp250 ribu. Setiap pengerjaan produk dilakukan dengan teliti dan memperhatikan detail serta proses quality control yang ketat untuk menjaga kualitas produk.

Founder Pamole Achmad Roby Cahyadi menambahkan, mereka juga berkolaborasi dengan pengrajin tas di Bandung yang sudah ahli dan berpengalaman puluhan tahun, sehingga produk tas yang dihasilkan memiliki ciri khas dan berkualitas. Secara tidak langsung, semua yang terlibat juga ikut menggerakkan dan berkontribusi dalam perputaran roda perekonomian, apalagi di tengah situasi pandemi saat sekarang ini. (ist)

Siasat Jahat (dari hal 1)

KPK telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (Covid-19). Juliari menyerahkan diri ke KPK, Minggu (6/12) dini hari ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona.

Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) mengecam upaya Kemensos menjadikan dana bansos ini sebagai bancakan korupsi. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menilai kasus korupsi ini merugikan masyarakat dua kali lipat. Selain di tengah kondisi banyaknya masyarakat membutuhkan bansos, kasus ini semakin menjadi beban lantaran sumber pendanaan bansos berasal dari utang.

"Rakyat Indonesia rugi dua kali, bansosnya dikorupsi dan masih harus menanggung utang dalam jangka panjang," ujar Misbah, Minggu (6/12). "Ini jelas melukai hati rakyat. Di tengah masyarakat miskin Indonesia yang sangat membutuhkan bansos karena tidak bisa bekerja atau di-PHK, ternyata dana bansos dikorupsi, dipakai bancakan," sambungnya.

Ia menjelaskan, total belanja PEN bidang perlindungan sosial mencapai 203,90 triliun. Pendapatan PEN itu paling besar berasal dari penambahan utang negara. Misbah menjelaskan, dari total tersebut, sebesar 53 persen atau Rp 107,80 triliun dialokasikan untuk bansos sembako. Dengan upaya penilapan Rp 10 ribu untuk tiap paket senilai Rp 300 ribu, potensi korupsi kasus tersebut menurutnya bisa mencapai Rp 3,59 triliun.

"Jadi kalau satu paket bansos berharga Rp 300 ribu, artinya ada 359,3 juta paket bansos. Kalau tiap paket nilai korupsinya Rp 10 ribu, potensi dana bansos yang bisa dikorupsi bisa hingga Rp 3,59 triliun," pungkasnya.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, membenarkan bahwa instrumen utang termasuk salah satu sumber dana bansos. Sumber lainnya ada dari penerimaan negara lainnya seperti penarikan pajak. Dari total Rp 695 triliun dana penanganan pandemi Covid-19, Rp 203 triliun digunakan untuk perlindungan sosial. "Ya itu satu kesatuan. APBN bersumber pada pendapatan negara dan pembiayaan melalui utang," pungkash Yustinus.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah sampai akhir Oktober 2020 sebesar Rp 5.877,71 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 37,84 persen. Posisi utang pemerintah pusat pada Oktober tercatat mengalami peningkatan dibandingkan bulan September 2020. Posisi utang pemerintah juga terpantau naik dari Rp 5.756,87 triliun menjadi Rp 5.877,71 triliun pada Oktober 2020.

Tiga Mensos Terciduk KPK

Menurut catatan, KPK sudah beberapa kali mengacak-acak korupsi di Kemensos. Juliari menjadi Mensos ketiga yang dicituk. Sebelumnya ada Bachtiar Chamsyah (Mensos 2001 -2009) yang korupsi pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong dan pengadaan sarung.

Ada juga Idrus Marham (Mensos 17 Januari 2018 - 24 Agustus 2018). Dia divonis 3 tahun penjara, lantaran terbukti menerima Rp 2,25 miliar terkait proyek PLTU Riau-1. Catatan korupsi di Kemensos itu mengingatkan akan pesan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam wawancaranya dengan Andy F. Noya pada Desember 2009.

Dalam kesempatan tersebut, Andy menanyakan alasan di balik pembubaran Depsos (nama Kemensos dahulu) kepada Gus Dur. Sebab, Andy menyinggung, banyak orang telantar yang harus diayomi oleh

departemen tersebut. "[Alasan] persisnya itu karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedeaan sampai hari ini," jawab Gus Dur kepada Andy.

"Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Kenapa Anda bakar lumbungnya?" balas Andy.

"Oh memang, karena tikusnya sudah menguasai lumbung," tukas Gus Dur yang disambut gelak tawa penonton.

Untuk diketahui, setelah puluhan tahun berdiri, lembaga tersebut dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Misbah menambahkan, Gus Dur mengaku sengaja tidak memasukkan Depsos dalam Kabinet Persatuan Indonesia. Sebab, ia menilai kerja sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang seyogyanya hanya menjadi fasilitas masyarakat.

Sementara itu, dalam Buku Rapor Capres, Guruh Dwi Riyanto dan Pebriasyah Ariefana menuliskan, pembubaran Depsos dinilai terlalu banyak melakukan korupsi. Ia menegaskan program kerja dari lembaga tersebut akan dilakukan oleh departemen lain.

Meski begitu, Laksananto Utama dalam bukunya Buku Ajar Hukum Jaminan Sosial mengatakan, sejumlah mantan petinggi lembaga tersebut membentuk Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Sebab, masalah kesejahteraan sosial muncul akibat bencana alam dan naiknya populasi anak jalanan. Badan tersebut kemudian dibentuk kembali menjadi Depsos pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Terkait kebijakan Gus Dur menghapus Depsos, salah satu putri Gus Dur, Alissa Wahid mengatakan fungsi Depsos yang seharusnya untuk membangun kesejahteraan rakyat justru dikorupsi pada Era Order Baru.

"Korupsinya gede-gedeaan karena dananya besar dan target penerimanya langsung rakyat kecil yang nggak ngerti tata kelola pemerintahan. Depsos jadi sarang kedzaliman, karena yang diambil adalah dana buat rakyat kecil," ujar Alissa melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/12).

Ia menambahkan, korupsi anggaran Depsos berbeda dengan pembangunan infrastruktur, di mana, korupsi dilakukan bersama antara pejabat dan pemain bisnis. "Kalau dana sosial, duitnya seharusnya diterima rakyat langsung, tapi rakyatnya tidak mengerti ada program itu, tidak mengerti berapa haknya, tidak mengerti bagaimana cara penerimaannya. Jadi gampang sekali dikorupsi, dan korupsinya berjemaah," tambahnya.

Selain itu, lanjut Alissa, Depsos juga dijadikan alat bagi rezim pemerintah untuk 'membeli' dukungan dari rakyat. Apabila, rakyat tidak mau menurut, konsekuensinya adalah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Alhasil, Depsos menjadi alat untuk merepresi rakyat. "Sifat alamiah bansos itu membuat memang ini jadi lumbung korupsi. Dan sudah mengurat di masa Orde Baru itu. Makanya Gus Dur membubarkan," pungkashnya. (ist,ins)



DERETAN MENTERI SOSIAL TERSAANDUNG KORUPSI



JULIARI BATUBARA (Mensos 23 Oktober 2019 - 6 Desember 2020)

Tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pada Minggu (6/12/2020) dini hari, Juliari menyerahkan diri paska dinyatakan sebagai tersangka.

tahun 2006 hingga 2008 yang dananya bersumber dari Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Ditahan sejak 5 Agustus 2010. Pada 15 Maret 2011, dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.



BACHTIAR CHAMSYAH (Mensos 2001-2009)

Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2004 dan APBN tahun anggaran 2006, pengadaan sapi potong yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2004, serta pengadaan sarung



IDRUS MARHAM (Mensos 17 Januari 2018 - 24 Agustus 2018)

Divonis 3 tahun penjara, lantaran terbukti menerima Rp 2,25 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) melalui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait proyek PLTU Riau-1.

KONI JATIM SIAPKAN TIM PSIKOLOG UNTUK ATASI KEJENUHAN ATLET SELAMA PNN

Surabaya- Jenuh, menjadi musuh terbesar atlet Jawa Timur (Jatim) yang kini melaksanakan Puslatda New Normal (PNN) di tengah Pandemi Covid-19. Hal ini tidak mengejutkan, lantaran mereka harus bersama-sama mulai dari berlatih hingga melakukan kegiatan sehari-hari sejak September lalu.

Direktur Badan Pelaksana Puslatda Jatim M.Nabil mengakui rasa bosan atau jenuh akan menjadi kendala utama atlet saat menjalankan program PNN. Solusi yang disiapkan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah dengan menerjunkan tim psikolog. Harapan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Pasti mereka bosan. Sebab anak-anak muda ini biasanya keluar. Makanya kami terjunkan tim psikolog. Ini kan pilihan ekstrem. Karena keadaan ekstrem jadi pilihan kebijakannya juga ekstrem, jangan sampai kejenuhan itu dikeluarkan dalam sebuah kegiatan kemudian menimbulkan sesuatu yang



Direktur Badan Pelaksana Puslatda Jatim M.Nabil

tidak diinginkan," kata Nabil.

Nabil menjelaskan PNN masih akan terus dilanjutkan sampai melihat perkembangan kondisi pandemi covid-19 apakah meningkat atau tidak. PNN ini ditegaskan Nabil sudah efektif untuk menangani pembinaan serta pembentukan performa atlet yang disiapkan di PON Papua 2021.

Untuk diketahui, Pekan Olahraga Nasional XX, disingkat PON XX, atau PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama yang diselenggarakan di Papua. Pekan Olahraga Nasional 2021 akan berlangsung pada 20 Oktober hingga 4 November 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Tagline yang diangkat pada edisi ini adalah "Torang Bisa" yang merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Ajang ini semula akan diadakan pada tahun 2020, namun ditunda ke tahun 2021 sehubungan dengan Pandemi Covid-19.(adv)

KASUS CORONA MAKIN TINGGI, MENTERI KESEHATAN KORSEL DIGANTI

Seoul- Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 membuat Korea Selatan memasuki gelombang ketiga wabah ini. Melihat kondisi tersebut, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pun mencopot Park Neung-hoo dari jabatan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korsel.

Dikutip dari Korea Times Minggu (6/12/2020) sebagai gantinya, Presiden Moon menunjuk Kwon Deok-Cheol, kepala Institut Pengembangan Industri Kesehatan Korea Selatan sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan yang baru.

Pergantian ini diduga berkaitan dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Korea Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Korea Selatan saat ini mengalami lonjakan gelombang ketiga virus corona. Tren kasus infeksi di Negri Ginseng itu masih mengalami tren kenaikan.

Sejak pekan ketiga November 2020, Korsel mengalami lonjakan kasus infeksi yang jumlahnya menyamai kasus di akhir Februari dan awal bulan Maret. Yaitu saat Korsel mengalami puncak gelombang pertama Covid-19. Dikutip dari rekap Worldometers Korsel saat ini melaporkan total 36.915 kasus infeksi virus corona. Jumlah kematian di negara itu karena Covid-19 berjumlah 540 orang dan pasien yang sembuh berjumlah 28.917 orang.

Park Neung-hoo yang lahir pada 24 Juni

1956, menjabat Menteri Kesehatan Korsel sejak Juli 2017. Lulusan Master Ilmu Politik dari Universitas Nasional Seoul itu sebelumnya menjabat Anggota Komite Keamanan Mata Pencapaian Pusat, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Pria yang memiliki gelar Ph.D dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Universitas California, Berkeley, UC Berkeley itu juga mengajar sebagai profesord di Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Kyunggi.

Sementara Kwon Deok-cheo sebelumnya pernah ditunjuk Moon sebagai wakil menteri kesehatan dan kesejahteraan, dan mempromosikannya dari jabatan asisten menteri perencanaan dan koordinasi. Dikutip dari koreabiomed, Kwon lahir di Namwon, Provinsi Jeolla Utara, dan lulus dari Universitas Sungkyunkwan dan mendapatkan gelar master dan doktoralnya di Universitas Speyer di Jerman.

Setelah lulus ujian negara bagian ke-31 untuk pegawai negeri, ia menjabat sebagai direktur jenderal di berbagai biro kementerian. Termasuk menangani kebijakan pengasuhan anak, kebijakan kesejahteraan, dan kebijakan perawatan kesehatan. Kwon dianggap kompeten menggantikan menteri sebelumnya karena pernah menempati berbagai posisi di



Menteri Kesehatan Korsel, Park Neung-hoo

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Sementara Park, selain kasus Covid-19 yang masih belum terkendali, juga karena dianggap melakukan kesalahan terkait penanganan vaksin Covid-19. Park pun bertikai terkait dengan urusan peningkatan kuota masuk sekolah kedokteran.

Selain jabatan Menteri Kesehatan, dilansir dari yna.co.kr, beberapa pos menteri yang diganti adalah Menteri Pertanian dan Transportasi, Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga, Menteri Urusan Dalam Negeri, serta Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan.

Untuk Menteri Pertanian dan Transportasi, Moon memilih Byeon Chang-Heum yang merupakan kepala Pertanian Korea dan Korporasi Perumahan. Kim Hyun-mee, Menteri Pertanian dan Transportasi digantikan karena tidak efektifnya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi harga sewa dan properti yang semakin meningkat. (ist)